BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA HUKUM DAN HAM

LAPORAN KEUANGAN

SEMESTER I

bpsdm
HUKUM DAN HAM

ESELON I

2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPSDM Hukum dan HAM adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPSDM Hukum dan HAM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPSDM Hukum dan HAM. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Depok, 22 Juli 2024
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAZILU
NIP 196611281991031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		I
Daftar Isi		II
Pernyataan Tanggung Jawab		III
Ringkasan		IV
I.	Laporan Realisasi Anggaran	1
II.	Neraca	2
III.	Laporan Operasional	3
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	4
V.	Catatan atas Laporan Keuangan	5
	A. Penjelasan Umum	5
	B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	17
	C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	29
	D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	43
	E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	51
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	54
VI.	Lampiran dan Daftar	

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
JALAN RAYA GANDUL NO.4 CINERE DEPOK
TELEPON 021-7543708, FAXIMILE 021-7543709

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Depok, 22 Juli 2024
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
RAZILU
NIP 196611281991031002

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Semester I Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.071.429.888,00 dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp996.300.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp106.328.562.369,00 atau mencapai 34% dari alokasi anggaran sebesar Rp310.679.530.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024. Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.491.394.963.938,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.733.374.440,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.488.215.168.198,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp446.421.300,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp9.082.558.992,00 dan Rp1.482.312.404.946,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp515.956.453,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp119.815.902.534,00 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp119.299.946.081,00). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp287.688.881,00 dan (Rp119.012.257.200,00) sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp119.012.257.200,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal periode yang berakhir per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp1.494.896.543.769,00 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp119.012.257.200,00) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai (Rp52.493.122,00) dan transaksi antar entitas senilai Rp106.480.611.499,00 kenaikan/penurunan ekuitas (Rp12.584.138.823,00) sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp1.482.312.404.946,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		%	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		996.300.000	1.071.429.888	108	595.625.507
JUMLAH PENDAPATAN		**996.300.000**	**1.071.429.888**	**108**	**595.625.507**
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	37.896.257.000	20.178.488.611	53	18.823.311.557
Belanja Barang	B.4	182.738.299.000	78.864.723.304	43	76.708.333.450
Belanja Modal	B.5	90.044.974.000	7.285.350.454	8	4.004.145.569
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		**310.679.530.000**	**106.328.562.369**	**34**	**99.535.790.576**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
NERACA
PER 30 JUNI 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	803.606.855	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	1.290.900.252	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	186.800	329.520.029
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.5		(1.647.600)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		186.800	327.872.429
Belanja Dibayar di Muka	C.6	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.7	-	-
Persediaan	C.8	638.680.533	399.048.889
Jumlah Aset Lancar		2.733.374.440	726.921.318
ASET TETAP			
Tanah	C.9	1.089.000.068.000	1.089.000.068.000
Peralatan dan Mesin	C.10	129.046.327.295	121.589.324.040
Gedung dan Bangunan	C.11	411.774.144.945	378.280.318.966
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.12	12.401.733.397	12.401.733.397
Aset Tetap Lainnya	C.13	3.215.178.792	3.215.178.792
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.14	1.518.943.725	26.675.304.285
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.15	(158.741.227.956)	(144.648.414.799)
Jumlah Aset Tetap		1.488.215.168.198	1.486.513.512.681
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.16	3.128.855.133	3.157.897.433
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.17	-	12.391.866.906
Aset Lain-Lain	C.18	6.024.618.765	8.053.909.538
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.19	(8.707.052.598)	(10.499.810.188)
Jumlah Aset Lainnya		446.421.300	13.103.863.689
JUMLAH ASET		**1.491.394.963.938**	**1.500.344.297.688**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.20	803.606.855	-
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.21	6.243.426.062	5.386.205.244
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.22	2.035.526.075	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.23	-	61.548.675
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.24	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		9.082.558.992	5.447.753.919
JUMLAH KEWAJIBAN		9.082.558.992	5.447.753.919
EKUITAS			
Ekuitas	C.25	1.482.312.404.946	1.494.896.543.769
JUMLAH EKUITAS		1.482.312.404.946	1.494.896.543.769
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**1.491.394.963.938**	**1.500.344.297.688**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	515.956.453	147.309.507
JUMLAH PENDAPATAN		**515.956.453**	**147.309.507**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	22.432.228.544	20.919.119.256
Beban Persediaan	D.3	774.842.305	496.959.400
Beban Barang dan Jasa	D.4	57.629.760.807	55.810.856.019
Beban Pemeliharaan	D.5	7.451.645.826	5.237.068.109
Beban Perjalanan Dinas	D.6	16.632.262.871	21.837.298.929
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	14.896.809.781	13.665.044.188
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(1.647.600)	-
Beban Lain-lain	D.11		
JUMLAH BEBAN		**119.815.902.534**	**117.966.345.901**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(119.299.946.081)	(117.819.036.394)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12	-	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar		165.558.099	93.420.164
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		165.558.099	94.897.664
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	1.477.500
Surplius/Defisit dari Kegiatan Non operasionalLai		122.130.782	453.973.603
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		122.130.782	453.973.603
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		287.688.881	547.393.767
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(119.012.257.200)	(117.271.642.627)
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		**(119.012.257.200)**	**(117.271.642.627)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	1.494.896.543.769	1.454.096.342.965
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(119.012.257.200)	(117.271.642.627)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		52.493.122	(59.748.814)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.4		
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5	52.493.122	(59.748.814)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
LAIN-LAIN		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	106.480.611.499	98.940.165.069
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(12.584.138.823)	(18.271.728.744)
EKUITAS AKHIR	E.5	**1.482.312.404.946**	**1.435.824.614.221**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

BPSDM Hukum dan HAM merupakan ujung tombak organisasi Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal pengembangan Aparatur Hukum dan HAM, sehingga organisasi ini dituntut untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap ASN agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang hukum dan HAM dengan sebaik-baiknya.

Kementerian Hukum dan HAM merupakan Kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kementerian Hukum dan HAM memiliki lingkup kerja yang sangat beragam, seperti bidang pemasyarakatan, bidang keimigrasian, bidang kekayaan intelektual, bidang administrasi hukum umum, pembinaan hukum nasional, peraturan perundang-undangan, penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) hak asasi manusia. Keragaman dan kompleksitas tugas ini tentunya memerlukan berbagai kecakapan dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif maupun teknis yang didasari oleh Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang hukum dan HAM, dengan lebih cepat *(faster)*, lebih baik *(better)*, lebih murah *(cheaper)*, dan terbaru *(newer).*

Permasalahan hukum dan HAM di Indonesia semakin dinamis dan kompleks. Masyarakat saat ini memiliki pemahaman dan daya kritis yang cukup tinggi di bidang hukum dan HAM. Perhatian dan tuntutan masyarakat terhadap permasalahan pelayanan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, pelayanan keimigrasian, pelayanan kekayaan intelektual, pelayanan jasa hukum dan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) HAM serta tugas Kementerian Hukum dan HAM lainnya, sehingga bila tidak diantisipasi dan direspon dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel, akan dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, pegawai Kementerian Hukum dan HAM dan pihak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

lain yang melaksanakan tugas di bidang hukum dan HAM, dituntut untuk senantiasa mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya dalam pelaksanaan tugasnya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kondisi di atas menjadi tantangan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk mewujudkan seluruh SDM Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis subtantif, teknis fungsional dan pelatihan hak asasi manusia.

Selain menyelenggarakan kegiatan diklat, BPSDM Hukum dan HAM juga melaksanakan *assessment center* untuk mendapatkan informasi dan pemetaan kompetensi (*soft competency*) yang dimiliki pegawai Kementerian Hukum dan HAM, dan yang dapat digunakan sebagai informasi yang memadai bagi pimpinan untuk keperluan promosi, rotasi, mutasi, pengembangan SDM untuk pembinaan karir pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugasnya juga bertanggung jawab meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia bukan saja bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM yang berada di instansi lain antara lain perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, aparat penegak hukum lainnya untuk Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Sebagai konsekuensi transformasi organisasi, ke depannya BPSDM Hukum dan HAM harus mampu mengantisipasi tantangan tugas pengembangan SDM Hukum dan HAM yang semakin kompleks dalam menghadapi dinamika persoalan hukum dan HAM masyarakat Indonesia dan internasional. Melalui transformasi organisasi ini, diharapkan kegiatan pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM dapat lebih implementatif, adaptif (*relevan*), mudah diakses, dan berdampak tinggi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Tujuan :

"Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia"

Sasaran :

- Seluruh aparatur Hukum dan HAM memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas.
- Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi berkesinambungan.

Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 900).

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Semester I Tahun 2024 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Entitas akuntansi di lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM berjumlah 6 (enam) entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

No	Kode Es I	Entitas	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM	1	-	-	-	1
2	12	Politeknik Imigrasi	1	-	-	-	1
3	12	Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	1	-	-	-	1
4	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau	-	1	-	-	1
5	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	-	1	-	-	1
6	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	-	1	-	-	1
Jumlah			**3**	**3**	-	-	**6**

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

dan HAM dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konskuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Hukum dan HAM. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
d. Pendapatan Lain-lain

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
  c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah;
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	**Masa Manfaat**
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran

Selama periode Semester I Tahun Anggaran 2024, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi yang dilakukan berupa revisi dengan kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran, Kanwil Perbendaharaan, dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran serta merubah jumlah PAGU Anggaran DIPA awal. Perincian Anggaran awal dan setelah revisi berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Perubahan DIPA

Tahun Anggaran 2024

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	996.300.000	996.300.000
Pendapatan Lain-lain		-
Jumlah Pendapatan	**996.300.000**	**996.300.000**
Belanja		
Belanja Pegawai	34.767.519.000	37.896.257.000
Belanja Barang	183.123.669.000	182.738.299.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Belanja Modal	89.659.604.000	90.044.974.000
Jumlah Belanja	**307.550.792.000**	**310.679.530.000**

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Rp1.071.429.888,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp1.071.429.888,00 atau mencapai 108% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp996,300.000,00. Pendapatan lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	90.000.000	257.901.980	286,56
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	906.300.000	-	-
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan	-	70.114.000	-
Pendapatan Denda	-	362.063.897	-
Pendapatan Lain-lain	-	381.350.011	-
Jumlah	**996.300.000**	**1.071.429.888**	**107,54**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Realisasi Pendapatan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 79,88% dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada TA 2023. Hal ini disebabkan karena pedapatan dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan Tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	257.901.980	137.457.327	87,62
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	-	-	-
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	70.114.000	4.194.577	94
Pendapatan Denda	362.063.897	-	-
Pendapatan Lain-lain	381.350.011	453.973.603	(16,00)
Jumlah	**1.071.429.888**	**595.625.507**	**79,88**

Rincian Realisasi Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha (4251) sebesar Rp 257.901.980,00 terdiri dari :
   - Realisasi akun (425122) Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp51.653.000,00 berasal dari satker BPSDM Hukum dan HAM yang merupakan pendapatan dari hasil lelang inventaris kantor.
   - Realisasi akun (425129) Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp113.905.099,00 berasal dari satker BPSDM Hukum dan HAM berupa lelang 3 mobil kendaraan dinas.
   - Realisasi akun (425131) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp92.343.881,00 berasal dari:
     a. Satker BPSDM sebesar Rp92.309.000,00 atas sewa Auditorium, sewa Kamar Flat, sewa Kamar Asrama, sewa Ruangan Kantin.
     b. Satker Poltekim sebesar Rp34.881,00 merupakan pendapatan atas sewa rumah dinas untuk Direktur Politeknik Imigrasi 1 periode.
2. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan (4257) pada satker Poltekim berupa realisasi akun (425765) Pendapatan dari penutupan rekening sebesar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Rp70.114.000,00 yang merupakan pengembalian dana pendidikan karena terdapat 2 (dua) orang pegawai Taruna Tingkat I yg mengundurkan diri.

3. Pendapatan Denda (4258) berupa realisasi Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) sebesar Rp362.063.897,00 terdapat pada :
   - Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp355.475.097,00 merupakan Denda Penyelesaian Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Rektorat Akademik BPSDM Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.186.430,00 dan Denda Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rektorat Akademik Termin V BPSDM Hukum dan HAM-Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp342.288.667,00.
   - Satker POLTEKIM sebesar Rp1.388.800,00 dikarenakan terdapat pekerjaan kontrak Pengadaan Lemari Kayu untuk asrama taruna yg melewati batas waktu (denda) pekerjaan selama 16 hari kalender.
   - Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebesar Rp5.200.000,00 merupakan denda keterlambatan pekerjaan pembangunan Asrama 2 Lantai dan Gedung Serbaguna 2 Lantai pada Balai Pendidikan Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021.
4. Pendapatan Lain-Lain (4259) sebesar Rp381.350.011,00 terdiri dari:
   - Terdapat realisasi akun (425911) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp1.123.640,00 yang terdiri dari :
     a. Satker Poltekip sebesar Rp 2,840,00 berupa Komponen kekurangan KGB/ Gaji.
     b. Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebesar Rp1.120.800,00 Komponen kekurangan KGB/ Gaji.
   - Terdapat realisasi akun (425912) Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp48.986.593,00 terdapat pada :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

a. Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp13.964.000,00 pengembalian atas kesalahan pembebanan kelebihan pembayaran gaji ke belanja barang yang harusnya belanja pegawai sebanyak 1 (satu) orang pegawai periode Juni-September 2018 karena sedang CLTN.
b. Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp35.022.593,00 yang merupakan pengembalian sewa mobil sebesar Rp33.842.342,00 dan kelebihan pemeliharaan Rp1.180.251,00.

- Terdapat realisasi akun (425913) Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp331.239.778,00 yang terdiri dari :
  a. Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp323.941.583,00 Penyetoran kembali ke kas negara atas kelebihan belanja modal Gedung rektorat sebesar Rp238.009.337,00 dan Lapangan tenis *indoor* sebesar Rp85.932.246,00.
  b. Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah sebesar Rp4.398.195,00 atas Kelebihan Pembayaran Belanja Modal atas kelebihan volume pekerjaan Sarana Olahraga Outdoor, Rumah Negara dan Kolam Retensi Balai Diklat Kumham Jawa Tengah TA 2023.
  c. Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebesar Rp2.900.000,00 merupakan kelebihan pembayaran kepada PT.Trikarsa Utama Lestari total atas pekerjaan pembangunan asrama 2 (dua) lantai dan gedung serbaguna 2 (dua) lantai yang tidak sesuai spesifikasi kontrak dan denda keterlambatan.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Rp106.328.562.369,00

Realisasi Belanja pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp106.328.562.369,00 atau 34,22% dari anggaran belanja sebesar Rp310.679.530.000,00 Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

URAIAN	TA 2024		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	37.896.257.000	20.192.479.527	53,28
Belanja Barang	182.738.299.000	78.864.923.304	43,16
Belanja Modal	90.044.974.000	7.285.350.454	8,09
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	**310.679.530.000**	**106.342.753.285**	**34,23**
Pengembalian Belanja		(14.190.916)	-
Total Belanja	**310.679.530.000**	**106.328.562.369**	**34,22**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

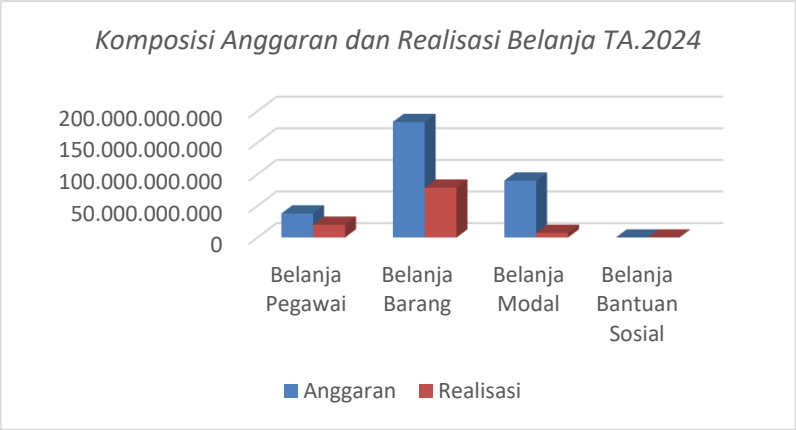

Dibandingkan dengan Semester I Tahun Anggaran 2024, realisasi belanja pada Semester I Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 6,82%.

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2024 dan 2023

URAIAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	20.178.488.611	18.823.311.557	7,20
Belanja Barang	78.864.723.304	76.708.333.450	2,81
Belanja Modal	7.285.350.454	4.004.145.569	81,95
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**106.328.562.369**	**99.535.790.576**	**6,82**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp20.178.488.611,00

Realisasi Belanja Pegawai Semester I Tahun Anggaran 2024 dan Semester I Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar Rp20.178.488.611,00 dan Rp18.823.311.557,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai Semester I Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,20% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya pegawai yang mutasi keluar ataupun masuk BPSDM Hukum dan HAM, pegawai yang menerima kenaikan pangkat dan pegawai yang mutasi menjadi JFT.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	19.244.302.826	18.342.868.928	4,91
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	335.725.701,00	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	612.451.000	481.926.000,00	27,08
Belanja Tunj.Khusus & Belanja Pegawai Transito	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**20.192.479.527**	**18.824.794.928**	**7,27**
Pengembalian Belanja Pegawai	(13.990.916)	(1.483.371)	843,18
Jumlah Belanja	**20.178.488.611**	**18.823.311.557**	**7,20**

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai per 30 Juni 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	24.225.996.000	13.643.067.600	6.373.200	13.636.694.400	56,32
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	380.000	222.056	10.716	211.340	58,44
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.551.845.000	864.045.450	637.320	863.408.130	55,68
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	431.135.000	239.981.752	-	239.981.752	55,66
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	542.015.000	323.355.000	-	323.355.000	59,66
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.731.039.000	1.544.495.000	370.000	1.544.125.000	56,55
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	336.732.000	264.610.368	-	264.610.368	78,58
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1.136.598.000	653.952.600	289.680	653.662.920	57,54
511129	Belanja Uang Makan PNS	3.655.028.000	1.406.523.000	-	1.406.523.000	38,48
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	539.346.000	304.050.000	6.310.000	297.740.000	56,37
512211	Belanja Uang Lembur	1.681.766.000	612.451.000	-	612.451.000	36,42
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	637.648.000	255.058.800		255.058.800	40,00
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.000	2.421		2.421	26,90
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	21.318.000	8.526.800		8.526.800	40,00
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	5.668.000	2.267.200		2.267.200	40,00
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	61.750.000	24.700.000		24.700.000	40,00
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	26.072.000	10.428.480		10.428.480	40,00
511628	Belanja Uang Makan PPPK	144.872.000	34.742.000		34.742.000	23,98
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	167.040.000	-	-	-	-
JUMLAH		**37.896.257.000**	**20.192.479.527**	**13.990.916**	**20.178.488.611**	**53,28**

Pada laporan realisasi anggaran yang berakhir per 30 Juni TA 2024 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp13.990.916,00 dengan rincian:

- Satker BPSDM sebesar Rp13.987.746,00 atas belanja gaji pokok PNS, tunjangan suami/istri PNS, pembulatan gaji PNS, tunjangan fungsional PNS, tunjangan beras PNS, dan tunjangan umum PNS.
- Satker Poltekim sebesar Rp2.393,00 atas belanja pembulatan gaji PNS.
- Satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp631,00 atas pengembalian pembulatan gaji PNS.
- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp146,00 atas pembulatan gaji pokok PNS.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang Rp78.864.723.304,00

Realisasi Belanja Barang Semester I Tahun Anggaran 2024 dan Semester I Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar Rp78.864.723.304,00 dan Rp76.708.333.450,00.

Realisasi Belanja Barang Semester I Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 23,90% dari Semester I TA 2023. Hal ini disebabkan terjadinya penambahan anggaran Belanja Barang Semester I Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan Semester I Tahun Anggaran 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2024 dan 2023

URAIAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	12.948.991.517	8.075.219.330	60,35
Belanja Barang Non Operasional	29.970.242.146	30.514.376.189	(1,78)
Belanja Persediaan	564.526.823	369.713.475	52,69
Belanja Jasa	12.824.510.596	12.690.252.543	1,06
Belanja Pemeliharaan	6.877.773.521	5.093.941.984	35,02
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	15.678.878.701	19.967.829.929	(21,48)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**78.864.923.304**	**76.711.333.450**	**2,81**
Pengembalian Belanja	(200.000)	(3.000.000)	
Jumlah Belanja	**78.864.723.304**	**76.708.333.450**	**2,81**

Realisasi Anggaran Belanja Barang per 30 Juni 2024

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
5211	Belanja Barang Operasional	27.503.175.000	12.948.991.517	-	12.948.991.517	47,08
5212	Belanja Barang Non Operasional	66.686.147.000	29.970.242.146	-	29.970.242.146	44,94
5218	Belanja Barang Persediaan	1.718.726.000	564.526.823	-	564.526.823	32,85
5221	Belanja Jasa	32.167.064.000	12.824.510.596	-	12.824.510.596	39,87
5231	Belanja Pemeliharaan	15.388.874.000	6.877.773.521	-	6.877.773.521	44,69
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	39.274.313.000	15.678.878.701	200.000	15.678.678.701	39,92
		182.738.299.000	**78.864.923.304**	**200.000**	**78.864.723.304**	**43,16**

Pada laporan realisasi belanja barang terdapat Pengembalian akun Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) sebesar Rp200.000,00 terdapat pada satker BPSDM Hukum dan HAM dari belanja perjalanan dinas biasa.

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal Rp7.285.350.454,

Realisasi Belanja Modal Semester I Tahun Anggaran 2024 dan Semester I Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

00

Rp7.285.350.454,00 dan Rp4.004.145.569,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada Semester I Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 81,95% dibandingkan Semester I Tahun Anggaran 2023 hal ini dikarenakan realisasi belanja modal pembangunan Gedung Rektorat Politeknik Tangerang pada Satker BPSDM Hukum dan HAM, penambahan nilai gedung dan bangunan pada Balai Diklat Kepulauan Riau, dan percepatan realisasi peralatan dan mesin pada Balai Diklat Sulawesi Utara.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2024 dan 2023

URAIAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.500.408.200	3.470.843.425	58,47
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.784.942.254	493.630.494	261,59
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	39.671.650	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	**7.285.350.454**	**4.004.145.569**	**81,95**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**7.285.350.454**	**4.004.145.569**	**81,95**

Rincian Realisasi Belanja Barang Modal
per 30 Juni 2024

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
5311	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.682.815.000	5.500.408.200	-	5.500.408.200	56,81
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.362.159.000	1.784.942.254	-	1.784.942.254	2,22
5361	Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-	-
		90.044.974.000	**7.285.350.454**	**0**	**7.285.350.454**	**8,09**

Belanja Modal Tanah
Rp0,00

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester I Tahun Anggaran 2024 dan Semester I Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
TA 2024 dan 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	-	-	-
Belanja Modal Pembebasan Tanah	-		
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-		-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	-	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp5.500.408.200,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp5.500.408.200,00 mengalami penurunan sebesar 58,47% bila dibandingkan dengan Semester I Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.470.843.425,00. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor serta penambahan dan peremajaan peralatan dan mesin yang sudah rusak untuk menunjang kinerja pegawai.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

URAIAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.500.408.200	3.470.843.425	58,47
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	-	-	
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal BLU	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**5.500.408.200**	**3.470.843.425**	**58,47**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**5.500.408.200**	**3.470.843.425**	**58,47**

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp1.784.942.254,00

Realisasi Belanja Modal Semester I Tahun Anggaran 2024 dan Semester I Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.784.942.254,00 dan Rp493.630.494,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.454.397.027	409.480.494	255
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	330.545.227	84.150.000	293
Jumlah Belanja Kotor	**1.784.942.254**	**493.630.494**	261,59
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	**1.784.942.254**	**493.630.494**	**261,59**

Realisasi Belanja Modal 30 Juni TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 261,59% dikarenakan belanja modal pembangunan gedung rektorat politeknik di Tangerang, renovasi gedung kantor Balai Diklat Kepri.

Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.000.000.000	1.454.397.027	-	1.454.397.027	1,82
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	362.159.000	330.545.227	-	330.545.227	91,27
		80.362.159.000	**1.784.942.254**	**0**	**1.784.942.254**	**2,22**

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp0,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester I Tahun Anggaran 2024 dan Semester I Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Belanja Modal Lainnya Rp0,00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 30 Juni TA 2024 dan 30 Juni TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp39.671.650,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik (Turun) %
Belanja *Software*	-	34.714.000	(100,00)
Belanja Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	-	4.957.650	0,00
Belanja Modal BLU	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**39.671.650**	**(100,00)**
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja	**-**	**39.671.650**	**(100,00)**

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester I Tahun Anggaran 2024 dan Semester I Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Rp0,00	Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp803.606.855,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp803.606.855,00 dan Rp0,00 merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran

TA 2024 dan 2023

Keterangan	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	697.800.000	-
Kas dibendahara Pengeluaran (TUP)	105.806.855	-
Jumlah	**803.606.855**	**-**

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan

Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

TA 2024 dan TA 2023

Keterangan	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	**-**	**-**

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas

Rp1.290.900.252,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.290.900.252,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas
TA 2024 dan 2023

Keterangan	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.290.900.252	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	**1.290.900.252**	**-**

C.4 Piutang Bukan Pajak

Piutang PNBP
Rp186.800,00

Saldo Piutang PNBP per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp186.800,00 dan Rp327.872.429,00. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Piutang PNBP
TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Piutang PNBP	186.800	329.520.029
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	-	(1.647.600)
Jumlah	**186.800**	**327.872.429**

C.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar
Rp0,00

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00.

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar
Semester I TA 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Jumlah	-	0,00%	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

C.6 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar Dimuka
Rp0,00

Saldo Beban Dibayar di Muka 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka
TA 2024 dan 2023

JENIS	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Pembayaran Internet	-	-
Koreksi nilai aset tetap non revaluasi	-	-
Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan	-	-
Jumlah	**-**	**-**

C.7 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Rp0,00

Pendapatan yang Masih Harus Diterima 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2024 dan 2023

JENIS	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Pendapatan Jasa Pelatihan		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan		
Jumlah	**-**	**-**

C.8 Persediaan

Persediaan
Rp638.680.533,00

Nilai Persediaan 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp638.680.533,00 dan Rp399.048.889,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Perbandingan Rincian Persediaan

TA 2024 dan 2023

JENIS	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Barang Konsumsi	514.413.018	389.158.389
Barang untuk Pemeliharaan	119.867.515	5.490.500
Amunisi	4.400.000	4.400.000
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	**638.680.533**	**399.048.889**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.9 Tanah

Tanah Rp1.089.000.068.000,00

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.1.089.000.068.000,00. Aset Tetap Tanah terdiri dari :

- Luas Tanah BPSDM Hukum dan HAM secara keseluruhan 103.770 m2 terletak di Jl. Raya Gandul No.4 Cinere, Depok.
- Tanah seluas 2.559 m^2 terletak di Jl. Percetakan Negara VII No.27, Rawasari, Jakarta Pusat.
- Aset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Utara Tanah seluas 3.000m^2 yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara terletak di Jl. Manembo-nembo Kel. Sagerat Weru Dua Kec. Matuari Kota Bitung Sulawesi Utara.
- Aset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah Tanah seluas 51.604m^2 yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terletak di Jl. Muhammad Ihksan, Semarang Jawa Tengah.
- Penambahan Asset tanah lainnya pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepulauan Riau seluas 40.000m^2 yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau terletak di Telaga Punggur – Pantai Timur Kabil Batam dimana status kepemilikan dalam proses sertifikasi Balik Nama di BPN.

Saldo Tanah per 30 Juni 2024 sebesar Rp1.089.000.068.000,00 berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp687.998.681.000;
- Satker Poltekip sebesar Rp58.851.882.000,00;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

- Satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp16.773.700.000,00;
- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp323.737.178.000,00;
- Satker Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp1.638.627.000,00.

C.10 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin

Rp129.046.327.295,00

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp129.046.327.295,00 dan Rp121.589.324.040,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2024	**Rp 121.589.324.040**
Mutasi tambah:	8.443.269.118
Saldo Awal	915.765.550
Pembelian	5.903.008.200
Transfer masuk	16.566.000
Reklasifikasi Masuk	1.607.929.368
Mutasi kurang:	986.265.863
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	252.793.000
Reklasifikasi Keluar	707.387.863
Transfer Keluar	26.085.000
Saldo per 30 Juni 2024	**Rp 129.046.327.295**
Akumulasi Penyusutan s.d.30 Juni 2024	Rp (91.277.544.446)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	**Rp 37.768.782.849**

Mutasi bertambah sebesar Rp8.443.269.118,00 mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp4.437.489.750,00;
- Satker Poltekim sebesar Rp417.400.000,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp1.600.805.000,00;
- Satker Badiklat Kepulauan Riau sebesar Rp923.850.000,00;
- Satker Badiklat Sulawesi Utara senilai Rp1.063.724.368,00.

Mutasi kurang sebesar Rp986.265.863,00 mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai berasal dari :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

- Satker BPSDM sebesar Rp278.878.000,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp265.655.000,00;
- Satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp434.608.495,00;
- Satker Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp7.124.368,00.

Saldo Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 sebesar Rp129.046.327.295,00 berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp87.852.202.898,00;
- Satker Poltekim sebesar Rp13.207.765.677,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp10.953.534.444,00;
- Satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp4.454.392.040,00;
- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp7.580.845.811,00;
- Satker Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp4.997.586.425,00.

C.11 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan

Rp411.774.144.945,00

Saldo gedung dan bangunan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp411.774.144.945,00 dan Rp378.280.318.966,00.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2024	**378.280.318.966**
Mutasi tambah:	34.415.256.279
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	34.137.991.957
Pengembangan Nilai Aset	277.264.322
Mutasi kurang:	921.430.300
Koreksi susulan	921.430.300
Saldo per 30 Juni 2024	**411.774.144.945**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(58.106.146.377)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	**353.667.998.568**

Terdapat nilai Mutasi Tambah sebesar Rp34.415.256.279,00 terdiri atas:

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar sebesar Rp34.137.991.957,00 berupa Penyelesaian Pembangunan dengan KDP.
- Satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp192.114.322,00 berupa Pengembangan Nilai Aset.
- Satker Balai Diklat Jawa Tengan sebesar Rp85.150.000,00 berupa Pengembangan Nilai Aset.

Terdapat Nilai Mutasi Kurang Rp921.430.300,00 pada satker BPSDM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Hukum dan HAM berupa koreksi susulan.

Saldo Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 sebesar Rp411.774.144.945,00 terdiri dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp332.761.497.457,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp5.140.133.032,00;
- Satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp13.105.158.857,00;
- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp48.638.093.295,00;
- Satker Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp12.129.262.304,00.

C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp12.401.733.397,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.401.733.397,00.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2024	**12.401.733.397**
Mutasi tambah:	-
Perolehan Lainnya	-
Mutasi kurang:	-
Revaluasi Aset	-
Saldo per 30 Juni 2024	**12.401.733.397**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(7.807.287.133)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	**4.594.446.264**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 sebesar Rp12.401.733.397,00 berasal dari satker BPSDM Hukum dan HAM.

C.13 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya

Rp3.215.178.792,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp3.215.178.792,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Saldo per 01 Januari 2024	**3.215.178.792**
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Reklas Masuk	-
Mutasi kurang:	
Penyelesaian Pembangunan	-
Saldo per 30 Juni 2024	**3.215.178.792**
Akumulasi Penyusutan s.d.30 Juni 2024	(1.550.250.000)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	**1.664.928.792**

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/ kebudayaan.

Saldo Aset tetap Lainnya per 30 Juni 2024 sebesar Rp3.215.178.792,00 berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp1.450.949.267,00;
- Satker Poltekim sebesar Rp868.538.800,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp867.743.575,00;
- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp7.983.150,00;
- Satker Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp19.964.000,00.

C.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp1.518.943.725,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.518.943.725,00 dan Rp26.675.304.285,00. Konstruksi dalam pengerjaan merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca, terdapat pada satker BPSDM Hukum dan HAM berupa pembangunan Gedung Rektorat kampus politeknik di Tangerang sebesar Rp1.465.662.820,00 dan Balai Diklat Kepulauan Riau atas renovasi gedung kantor sebesar Rp53.280.905,00.

C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Rp158.741.227.956,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp158.741.227.956,00 dan Rp144.648.414.799,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	129.046.327.295	91.277.544.446	37.768.782.849
2	Gedung dan Bangunan	411.774.144.945	58.106.146.377	353.667.998.568
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.401.733.397	7.807.287.133	4.594.446.264
4	Aset Tetap Lainnya	3.215.178.792	1.550.250.000	1.664.928.792
Total		**556.437.384.429**	**158.741.227.956**	**397.696.156.473**

C.16 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp3.128.855.133,00

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.128.855.133,00 dan Rp3.157.897.433,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan terdapat pada lampiran. Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2024

No.	Uraian	Nilai	
1	Software Komputer	Rp	3.128.855.133
2	ATB Lainnya	Rp	-
Jumlah Nilai Perolehan per 30 Juni 2024		**Rp**	**3.128.855.133**

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2024	**Rp**	**3.157.897.433**
Mutasi tambah:	Rp	-
Pengembangan Apk	Rp	-
Pembelian	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	29.042.300
Penghentian ATB dari Penggunaan	Rp	29.042.300
Saldo per 30 Juni 2024	**Rp**	**3.128.855.133**
Amortisasi s.d 30 Juni 2024	Rp	(2.703.636.333)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	**Rp**	**425.218.800**

Mutasi kurang sebesar Rp29.042.300,00 terdapat pada Satker Badiklat Kepulauan Riau berupa Penghentian Aset Tak Berwujud (ATB) pada Aplikasi CoP (Community of Practice) dari penggunaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2024 sebesar Rp3.128.855.133,00 berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp1.476.732.100,00;
- Satker Poltekim sebesar Rp652.865.033,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp774.458.000,00;
- Satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp40.000.000,00;
- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp140.750.000,00;
- Satker Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp44.050.000,00.

C.17 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp0,00

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya berasal dari dana yang ditentukan untuk membiayai belanja modal yang merupakan hak pemerintah dalam hal ini berasal dari RPATA sebesar Nilai dana yang dibatasi penggunaannya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 Rp0,00 dan Rp12.391.866.906,00.

C.18 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp6.024.618.765,00

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp6.024.618.765,00 dan Rp8.053.909.538,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPSDM Hukum dan HAM serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Rincian Aset Lain-Lain Berdasarkan Jenis Aset
TA 2024 dan 2023

Jenis Aset	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah	6.024.618.765	8.053.909.538
Jumlah Belanja	**6.024.618.765**	**8.053.909.538**

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Saldo per 01 Januari 2024	**8.053.909.538**
Mutasi tambah:	**716.443.795**
Penghentian Aset dari Penggunaan	252.793.000
Reklasifikasi dari Aset Tetap	434.608.495
Penghentian ATB dari Penggunaan	29.042.300
Mutasi kurang:	**2.745.734.568**
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	2.745.734.568
Saldo per 30 Juni 2024	**6.024.618.765**
Akumulasi Penyusutan 30 Juni 2024	(6.003.416.265)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	**21.202.500**

Mutasi tambah aset lain-lain sebesar Rp687.401.495,00 terdapat pada:

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp252.793.000,00;
- Satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp434.608.495,00;

Mutasi kurang aset lain-lain sebesar Rp2.745.734.568,00 terdapat pada Satker BPSDM atas Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan.

Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2024 sebesar Rp6.024.618.765,00, berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp2.300.083.096,00;
- Satker Poltekim sebesar Rp1.636.583.236,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp1.585.196.512,00;
- Satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp463.650.795,00;
- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp39.105.126,00;

C.19 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Rp8.707.052.598,00

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.707.052.598,00 dan Rp10.499.810.188,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	*Software* Komputer	3.128.855.133	2.703.636.333	425.218.800
2	ATB Lainnya	-	-	-
Jumlah		**3.128.855.133**	**2.703.636.333**	**425.218.800**
B	Aset Lainnya	6.024.618.765	6.003.416.265	21.202.500
Jumlah		**6.024.618.765**	**6.003.416.265**	**21.202.500**
Total		**9.153.473.898**	**8.707.052.598**	**446.421.300**

C.20 Uang Muka dari KPPN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Uang Muka dari KPPN

Rp803.606.855,00

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp803.606.855,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.21 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga

Rp6.243.426.062,00

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp6.243.426.062,00 dan Rp5.386.205.244,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar danakan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang Kepada Pihak Ketiga terdiri dari Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar berupa belanja listrik, belanja air dan belanja telepon bulan Desember 2022 yang tagihannya diterima pada Januari 2023.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	2.253.739.933
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	2.618.285.877
3	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	80.500.000
4	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	1.290.900.252
Total		**Rp 6.243.426.062**

1. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (212111) sebesar Rp2.253.739.933,00 pada :
   - Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp1.285.419.731,00 merupakan belanja gaji pegawai yang sudah SPM di Juni untuk pembayaran bulan Juli;
   - Satker POLTEKIM sebesar Rp381.216.714,00 belanja gaji pegawai yang sudah SPM di Juni untuk pembayaran bulan Juli namun SP2D terbit pada tanggal 1 Juli 2024;
   - Satker POLTEKIP sebesar Rp363.406.435,00 belanja gaji pegawai yang sudah SPM di Juni untuk pembayaran bulan Juli namun SP2D terbit pada tanggal 1 Juli 2024;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

- Satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp83.381.336,00 merupakan belanja Gaji Induk PNS Bulan Juli 2024 untuk 20 Pegawai/ 54 Jiwa namun SP2D terbit pada tanggal 1 Juli 2024;
- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp84.759.735,00 merupakan belanja belanja Gaji Induk PNS Bulan Juli yang sudah SPM di Juni namun SP2D terbit pada tanggal 1 Juli 2024;
- Satker Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp55.555.982,00 merupakan belanja belanja Gaji Induk PNS Bulan Juli yang sudah SPM di Juni namun SP2D terbit pada tanggal 1 Juli 2024;

2. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (212112) sebesar Rp2.618.285.877,00 pada :
   - Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp713.740.277,00 merupakan LS Bendahara atas kontrak konsumsi peserta yang sudah SPM di Juni dan masih proses.
   - Satker POLTEKIM sebesar Rp1.192.000.000,00 merupakan merupakan LS bendahara atas belanja uang saku Taruna buan Juni;
   - Satker POLTEKIP sebesar Rp552.500.000,00 merupakan LS bendahara atas belanja uang perjalanan dinas.
   - Satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp54.600.000,00 merupakan belanja Honor PPNPN Bulan Juni Tahun 2024 untuk 13 Pegawai namun SP2D terbit pada tanggal 1 Juli 2024. Belanja Biaya Perjalanan Dinas Biasa dengan SPM terbit pada Tanggal 28 Juni 2024 namun SP2D terbit pada tanggal 02 Juli 2024 senilai Rp27.045.600,00;
   - Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp78.400.000,00 merupakan belanja Honor PPNPN Bulan Juni Tahun 2024 namun SP2D terbit pada tanggal 1 Juli 2024.
3. Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar (212113) sebesar Rp80.500.000,00 pada Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp80.500.0000,00 merupakan belanja modal (seperti laptop, meubel, mesin dll) dengan outstanding kontrak.
4. Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191) senilai Rp1.290.900.252,00 terdapat pada :
   - Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp757.729.180,00;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

- Satker POLTEKIM sebesar Rp330.922.167,00;
- Satker POLTEKIM sebesar Rp80.679.509,00;
- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp51.169.396,00;
- Satker Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp70.400.000,00.

C.22 Utang yang Belum Diterima Tagihannya

Utang yang Belum Diterima Tagihannya
Rp2.035.526.075,00

Utang yang Belum Diterima Tagihannya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.035.526.075,00 dan Rp0,00. Utang yang belum ditagihkan merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

C.23 Pendapatan Diterima di Muka

Utang Jangka Pendek Lainnya
Rp0,00

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar dan Rp0,00 dan Rp61.548.675,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

C.24 Utang Jangka Pendek Lainnya

Pendapatan Diterima di Muka
Rp0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayarkan kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

C.25 Ekuitas

Ekuitas
Rp1.482.312.404.946,00

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.482.312.404.946,00 dan Rp1.494.896.543.769,00.

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP Rp515.956.453,00

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp515.956.453,00 dan Rp147.309.507,00 Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2024 dan 2023

AKUN	URAIAN	TA 2024	TA 2023
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	153.892.556	143.114.930
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	-	-
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	4.194.577
425811	Pendapatan dari Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	362.063.897	-
Jumlah	**Jumlah**	**515.956.453**	**147.309.507**

Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak antara lain:

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) sebesar Rp153.892.556,00 terdapat pada:
  a. Satker BPSDM sebesar Rp124.489.657,00;
  b. Satker Poltekim sebesar Rp34.881,00;
  c. Satker Poltekip sebesar Rp28.368.018,00;
- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) sebesar Rp362.063.897,00 terdapat pada :
  a. Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp355.475.097,00 merupakan potongan SPM atas pembayaran belanja barang;
  b. Satker POLTEKIM sebesar Rp1.388.800,00;
  c. Satker Badiklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebesar Rp5.200.000,00.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp22.432.228.544,00

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp22.432.228.544,00 dan Rp20.919.119.256,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai

TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023
Beban Gaji Pokok PNS	15.328.069.500	14.499.062.920
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	-6.373.200	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	244.130	243.431
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-10.716	-3.329
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	971.507.980	896.510.290
Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-637.320	-
Beban Tunj. Anak PNS	269.471.600	240.122.702
Beban Tunj. Struktural PNS	359.845.000	365.805.000
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	-	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.740.972.000	1.732.267.000
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	-370.000	-
Beban Tunj. PPh PNS	271.376.841	111.497.424
Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	-289.680	-
Beban Tunj. Beras PNS	734.636.530	737.452.860
Beban Uang Makan PNS	1.406.523.000	1.488.830.000
Beban Tunjangan Umum PNS	340.150.000	366.885.000
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-6.310.000	-1.480.042
Beban Uang Lembur	612.451.000	481.926.000
Belanja Gaji Pokok PPPK	318.823.500	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.279	-
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	10.658.500	-
Belanja Tunjangan Anak PPPK	2.834.000	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	30.875.000	-
Belanja Tunjangan Beras PPPK	13.035.600	-
Belanja Uang Makan PPPK	34.742.000	-
Belanja Uang Lembur PPPK	-	-
Jumlah	**22.432.228.544**	**20.919.119.256**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp774.842.305,00

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp774.842.305,00 dan Rp496.959.400,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Persediaan

TA 2024 dan TA 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	774.842.305	496.959.400	55,92
Beban Persediaan bahan baku	-	-	-
Beban Persediaan Amunisi	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	**774.842.305**	**496.959.400**	**55,92**

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp57.629.760.807,00

Beban barang dan jasa pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp57.629.760.807,00 dan Rp55.810.856.019,00.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa

TA 2024 dan 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	% Naik (TURUN)
Beban Keperluan Perkantoran	12.175.701.161	8.284.177.936	47
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.076.000	1.839.670	(42)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	233.664.000	433.650.000	(46)
Beban Barang Operasional Lainnya	889.563.559	361.734.050	146
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVI	-	37.529.200	(100)
Beban Bahan	13.100.650.074	14.884.150.338	(12)
Beban Honor Output Kegiatan	546.600.000	444.810.000	23
Beban Barang Non Operasional Lainnya	18.198.339.170	18.635.341.490	(2)
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi CO	-	77.099.051	(100)
Beban Langganan Listrik	2.102.538.602	1.829.737.495	15
Beban Langganan Telepon	8.001.414	7.499.798	7
Beban Langganan Air	102.346.700	33.536.000	205
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.242.216.373	1.050.583.080	18
Beban Sewa	3.718.923.402	4.592.028.320	(19)
Beban Jasa Profesi	5.044.020.000	4.903.590.000	3
Beban Jasa Lainnya	266.120.352	88.636.761	200
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	4.971.000	(100)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	-	139.941.830	(100)
Jumlah	**57.629.760.807**	**55.810.856.019**	3

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp7.451.645.826,00

Beban pemeliharaan pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.451.645.826,00 dan Rp5.237.068.109,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan

TA 2024 dan 2023

URAIAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023	% Naik (TURUN)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.725.656.188	3.264.044.046	75
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	134.565.093	227.627.900	(69)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.328.837.470	1.676.762.728	(26)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	262.587.075	68.633.435	74
Jumlah	**7.451.645.826**	**5.237.068.109**	**42**

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Beban Perjalanan Dinas

Rp16.632.262.871,00

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp16.632.262.871,00 dan Rp21.837.298.929,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas

TA 2024 dan TA 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Perjalanan Biasa	15.126.474.511	19.486.755.384	-22,38
Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	-200.000	-3.000.000	-93,33
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.600.000	147.800.000	1,89
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kot	1.355.388.360	2.205.743.545	-38,55
Jumlah	**16.632.262.871**	**21.837.298.929**	**-23,84**

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Rp0,00

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,00.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial

Rp0,00

Beban Bantuan Sosial 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp.0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rp14.896.809.781,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp14.896.809.781,00 dan Rp13.665.044.188,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2024 dan TA 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Realisasi 2024	Realisasi 2023	% Naik (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.312.244.599	7.964.666.119	4,4
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.413.939.679	4.774.010.955	13,4
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	433.285.455	573.834.976	(24,5)
Beban Penyusutan Irigasi	13.157.354	9.904.429	32,8
Beban Penyusutan Jaringan	406.250.000	5.078.125	7.900,0
Beban Amortisasi Software	279.554.784	293.122.570	(4,6)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	3.630.287	-	100,0
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	34.747.623	44.427.014	(21,8)
Jumlah	**14.896.809.781**	**13.665.044.188**	**9,0**

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp1.647.600,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.647.600,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2024 dan TA 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023	% Naik (TURUN)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	1.647.600	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	-	-	-
Jumlah	**1.647.600**	**-**	100%

D.11 BEBAN LAIN-LAIN

Beban Lain-lain
Rp0,00

Jumlah Beban Lain-lain untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp287.688.881,00

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp287.688.881,00 terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	165.558.099	94.897.664	74,46
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	1.477.500	-100,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	122.130.782	453.973.603	-73,10
Beban dari Keg. Non Operasional Lainnya	-	-	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**287.688.881**	**547.393.767**	**47,44**

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2021.*

Realisasi Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang diperoleh sebesar Rp122.130.782,00 terdapat pada :

a. Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp13.964.000,00 merupakan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912).
b. Satker Poltekim sebesar Rp70.114.000,00 merupakan Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (425791).
c. Satker Poltekip sebesar Rp2.840,00 merupakan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911) berupa Komponen kekurangan KGB/ Gaji.
d. Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah sebesar Rp33.842.342,00 merupakan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912) atas Pegembalian belanja Sewa Mobil dan Kelebihan belanja Pemeliharaan.
e. Satker Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp1.307.600,00 merupakan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911) atas Komponen kekurangan KGB/ Gaji dan Penerimaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (425913) sebesar Rp2.900.000,00.

D.13 POS-POS LUAR BIASA

Pos-Pos Luar Biasa Rp0,00

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp1.494.896.543.769,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.494.896.543.769,00 dan Rp1.454.096.342.965,00.

E.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO
(Rp119.012.257.200,00)

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah defisit sebesar (Rp119.012.257.200,00) dan (Rp117.271.642.627,00). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar
Rp0,00

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar Rp0,00.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0,00

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0,00

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,00.

E.3.3 Koreksi Reklasifikasi Aset

Koreksi Reklasifikasi Aset
Rp0,00

Reklasifikasi aset adalah pemindahan kelompok asset tetap ke aset lainnya. Koreksi reklasifikasi aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar dan Rp1.924.000,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset
Rp0,00

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset. Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,00.

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Rp52.493.122,00

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp52.493.122,00 dan Rp59.748.814,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan penyusutan transaksional atas koreksi nilai bertambah jalan khusus komplek, dengan rincian sebagai berikut:

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain
Rp0,00

Koreksi Lain-Lain untuk periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp106.480.611.499,00

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp106.480.611.499,00 dan Rp98.940.165.069,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(1.071.429.888)
Ditagihkan ke Entitas Lain	106.328.562.369
Transfer Masuk	1.239.782.143
Transfer Keluar	(16.303.125)
Jumlah	**106.480.611.499**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL/DKEL (Rp1.071.429.888 00)/ Rp106.328.562.369, 00

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DDEL sebesar (Rp1.071.429.888,00) sedangkan DKEL sebesar Rp106.328.562.369,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar Rp1.239.782.143,00 / Rp16.303.125,00

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp1.239.782.143,00 sedangkan Transfer Keluar sebesar Rp16.303.125,00.

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp1.482.312.404. 946,00

Nilai ekuitas pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.482.312.404.946,00 dan Rp1.435.824.614.221,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Tanah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM sudah terkoreksi sebesar 3.420 m² akibat pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari tetapi belum tercatat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Terkait penggantian tol dengan nilai appraisal sebesar Rp25.248.900.000,00. Saat ini masih dalam tahap perencanaan pembangunan dan penunjukan konsultan perencanaan pembangunan.
2. BPSDM Hukum dan HAM sedang melakukan proses peralihan nama sertifikat tanah untuk memenuhi ketentuan sertifikat, saat ini masih dalam proses menunggu berita acara hasil pengukuran tanah BPSDM Hukum dan HAM yang telah dilakukan oleh BPN Depok.
3. Aset tanah pada BPSDM Hukum dan HAM yang Sertifikatnya Belum Bersertifikat Sesuai Ketentuan (BBSK) atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan HAM dilakukan koordinasi ke BPN Depok untuk dilakukan permohonan pengukuran ulang melalui surat Nomor SDM.1-PB.04.01-02 tanggal 14 Maret 2023.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi